

BAB II

Telaah Pustaka dan Hipotesis

A. Telaah pustaka

1. Good Corporate Governance

Pengertian dari *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lain merupakan pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan *stakeholders* serta pengguna sumber daya yang berprinsipkan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Wardani, 2010). Hal tersebut, dalam keberadaannya penting dikarenakan oleh dua hal. Pertama, cepatnya perubahan yang berdampak pada persaingan global. Kedua, karena semakin banyak dan kompleksitas *stakeholder* termasuk struktur kepemilikan bisnis. Dua hal tersebut menyebabkan stres, resiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang, dan ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian yang prima.

Good Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. *Good Corporate Governance* memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif penting untuk meningkatkan kualitas proses bisnis melalui informasi yang dihasilkan serta peranannya sebagai *performance driver*, *performance measurement*. Proses bisnis diperbaiki secara tepat dan akurat apabila diperoleh

informasi yang akurat dan komprehensif tentang apa yang harus diperbaiki termasuk apa yang harus dilakukan.

a. Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* bagi suatu perusahaan, beberapa manfaat yang dapat diambil adalah (Syakhroza dalam Ratriani, 2005):

1. Memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan kedepannya
2. Meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban *stakeholder*.
4. Adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi perusahaan secara *legitimate*.
5. Menciptakan daya tarik kepada investor baik lokal maupun asing untuk meyakinkan kepada investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan.

Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* secara konsisten, konsekuen dan penuh dengan komitmen diharapkan perusahaan akan menjadi lebih handal karena secara umum manfaat lainnya adalah:

1. Entitas bisnis akan menjadi efisien.
2. Meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menjaga *going concern* perusahaan,
4. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
5. Mengurangi resiko manajemen.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Berikut ini merupakan beberapa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, yaitu (Kaihatu, 2006):

1. *Transparancy*

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi merupakan hal penting sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan yang *go public*.

2. *Fairness*

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundangan yang berlaku. *Fairness* menjadi jiwa

untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

3. *Accountability*

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).

4. *Responsibility*

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perlu dipastikan adanya kepatuhan perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

c. Dampak Tidak Dilaksanakan *Good Corporate Governance*

Menurut Wardani (2010) penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi tuntutan dalam dunia usaha pada saat ini. Jika suatu perusahaan tidak melaksanakan *Good Corporate Governance* maka beberapa kemungkinan dampak yang timbul antara lain:

1. Dampak Yuridis

- a. Ketidakpercayaan pemegang saham yaitu dengan adanya indikasi melemahnya harga saham.
- b. Keridakpercayaan karyawan yaitu dengan adanya indikasi tidak dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

c. Ketidakpercayaan publik yaitu dengan indikasi publik tidak mau menggunakan produk perusahaan yang nantinya berdampak pada kebangkrutan perusahaan.

d. Ketidakpercayaan kreditur yaitu dengan indikasi timbulnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

2. Dampak Hukum

a. Ancaman sanksi pidana atas tuduhan manipulasi maupun penggelapan pajak atau penyebaran berita bohong terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembukuan yang benar.

b. Ancaman gugatan perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat aktivitas perusahaan terkait.

2. Pengendalian Intern

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2010) pengendalian intern adalah sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha. Pengendalian intern menurut Arens dan Loebbecke (2008) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan.

Arens dan Loebbecke (2008) tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen perusahaan agar:

- a. Tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.
- c. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Dalam lingkungan perusahaan pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi), dan manajemen secara keseluruhan yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan.

a. Elemen-elemen Pengendalian Intern

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSSO) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), prosedur pengendalian (*control procedure*), pemantauan (*monitoring*), serta informasi dan komunikasi (*information and communication*).

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Setiap organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya resiko pasti muncul dalam setiap aktivitas baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis. Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan resiko yang muncul.

3. Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dan ketidakberesan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Personil yang kompeten, mutasi tugas, dan cuti wajib.
- b. Pelimpahan tanggung jawab.
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.

d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan asset, dan operasional.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak eksternal. Manajemen juga dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

b. Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial yang diperoleh manajer merupakan faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Menurut Tjiptono dan Diana (dalam Anggraeni, 2010) menyatakan kinerja manajerial yaitu kemampuan manajer dalam menggunakan pengetahuan, perilaku, dan bakat dalam melaksanakan tugasnya

sehingga tercapai sasaran dan tugas dari manajer tersebut. Tujuan pokok penilaian kinerja manajerial adalah untuk memotivasi bawahan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Mulyadi, 2001).

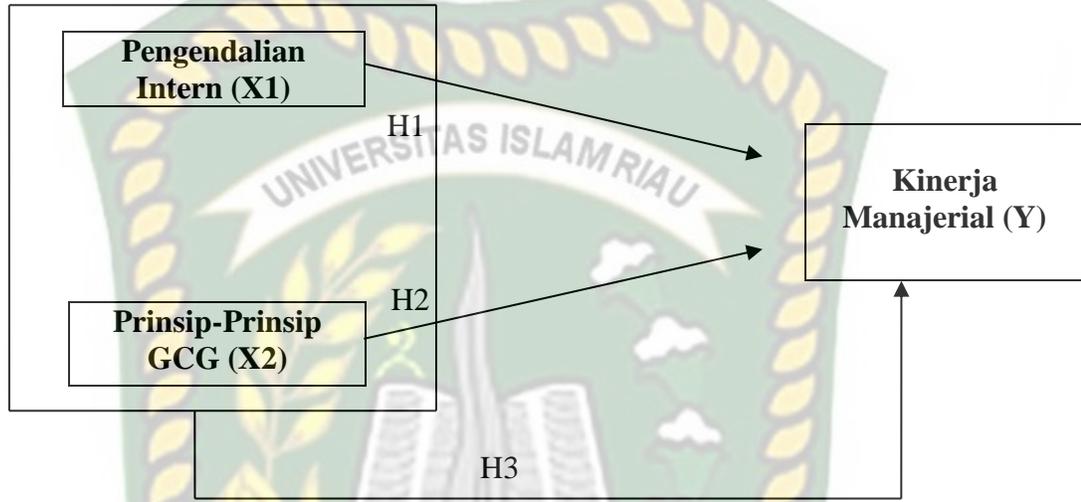
Menurut Mahoney dalam Wibowo (2006) yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam manajerial yang meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Investigasi
- c. Pengkoordinasian
- d. Evaluasi
- e. Pengawasan
- f. Pemilihan staff
- g. Perwakilan
- h. Negoisasi

Pengukuran kinerja manajerial merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam pengendalian manajemen. Pengukuran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi.

3. Model Penelitian

Gambar II.1
Model Penelitian



4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.
- H2: Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.
- H3: Pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.